

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara umum Pengertian Budaya Politik adalah pola perilaku suatu masyarakat dalam kehidupan bernegara, penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, hukum, adat istiadat, dan norma kebiasaan yang dihayati terhadap seluruh anggota masyarakat setiap harinya. Budaya politik diartikan sebagai suatu sistem nilai bersama suatu masyarakat secara sadar untuk berpartisipasi dalam mengambil keputusan kolektif dan kebijakan publik untuk masyarakat seluruhnya. Secara sederhana, Pengertian Budaya politik adalah nilai-nilai yang berkembang dan dipraktikkan suatu masyarakat tertentu dalam bidang politik.

Banyak sarjana ilmu politik yang mengkaji mengenai budaya politik sehingga terdapat beragam konsep budaya politik. Namun dari konsep tersebut memiliki derajat perbedaan yang tidak begitu besar, sehingga dapat tetap dalam satu pemahaman dan rambu-rambut yang sama. Hal ini tersebut terjadi pada pengertian budaya politik yang dimana banyak para ahli ilmu politik yang mendefinisikan budaya politik, Menurut Sidney Verba, “budaya politik adalah suatu sistem kepercayaan empirik, simbol-simbol ekspresif dan nilai-nilai yang menegaskan suatu situasi dimana tindakan politik dilakukan”. Dan Menurut Moctar Massoed, “pengertian budaya politik adalah sikap dan orientasi warga suatu negara terhadap kehidupan pemerintahan negara dan politiknya”.

Budaya Politik Partisipan, politik partisipan adalah budaya politik yang ditandai adanya kesadaran politik yang sangat tinggi. Budaya politik partisipan dapat dikatakan suatu bentuk budaya yang anggota masyarakatnya condong diorientasikan secara eksplisit terhadap sistem sebagai keseluruhan dan terhadap struktur dan proses politik serta administratif. Budaya politik yang ditandai dengan adanya kesadaran dirinya atau orang lain sebagai anggota aktif dalam kehidupan politik. Umumnya masyarakat budaya politik partisipan sadar bahwa betapapun kecil partisipasi dalam sistem politik, tetap saja merasa berarti dan berperan dalam berlangsungnya sistem politik. Begitu pun dengan budaya

politik partisipan masyarakat tidak menerima langsung keputusan politik, karena merasa sebagai anggota aktif dalam kehidupan politik yang memiliki hak dan tanggung jawab.

Secara konseptual, partisipasi politik berarti kegiatan seseorang ataupun sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik dengan jalan memilih pimpinan negara dan kebijakan pemerintah. Rakyat yang melakukan partisipasi politik didasari asumsi bahwa kepentingan dan kebutuhannya akan tersalurkan atau setidaknya dapat diperhatikan. Dewasa ini, partisipasi politik hanya diartikan sebatas pemberian suara pada pemilu, namun sebenarnya bentuk dari partisipasi politik sangatlah beragam dan dapat diwujudkan melalui diskusi politik, kampanye, ikut serta dalam partai politik, protes, demonstrasi, bahkan tindak kekerasan yang ditujukan kepada pemerintah dalam penyampaian aspirasi. Pemberian suara dalam pemilihan umum merupakan partisipasi politik aktif yang paling banyak dilakukan warga negara. Dalam suatu negara yang menganut paham demokrasi, rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi dimana rakyat mempunyai hak untuk ikut serta dalam proses pemerintahan dan berhak menentukan siapa saja yang akan menjadi pemimpin yang nantinya akan menentukan kebijakan umum. Keikutsertaan rakyat dalam proses pemerintahan diwujudkan melalui adanya penyelenggaraan pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan sarana bagi rakyat untuk menyalurkan aspirasi dalam menentukan wakil-wakilnya baik yang akan duduk di lembaga legislatif maupun eksekutif. Perwujudan pemilu juga sebagai sarana bagi rakyat untuk ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan politik. Sebelum tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh [Dewan Perwakilan Rakyat Daerah](#) (DPRD). Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang [Pemerintahan Daerah](#), kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada. Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni [2005](#).

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat [Pemilukada](#). Pemilihan kepala daerah pertama yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini adalah [Pilkada DKI Jakarta 2007](#).

Pada tahun 2011, terbit undang-undang baru mengenai penyelenggara pemilihan umum yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Di dalam undang-undang ini, istilah yang digunakan adalah Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Pada tahun 2014, DPR-RI kembali mengangkat isu krusial terkait pemilihan kepala daerah secara langsung. Sidang Paripurna DRI RI pada tanggal 24 September 2014 memutuskan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dikembalikan secara tidak langsung, atau kembali dipilih oleh DPRD. Putusan Pemilihan kepala daerah tidak langsung didukung oleh 226 anggota DPR-RI yang terdiri Fraksi [Partai Golkar](#) berjumlah 73 orang, Fraksi [Partai Keadilan Sejahtera](#) (PKS) berjumlah 55 orang, Fraksi [Partai Amanat Nasional](#) (PAN) berjumlah 44 orang, dan Fraksi [Partai Gerindra](#) berjumlah 32 orang.

Keputusan ini telah menyebabkan beberapa pihak kecewa. Keputusan ini dinilai sebagai langkah mundur di bidang "pembangunan" demokrasi, sehingga masih dicarikan cara untuk menggagalkan keputusan itu melalui uji materi ke MK. Bagi sebagian pihak yang lain, Pemilukada tidak langsung atau langsung dinilai sama saja. Tetapi satu hal prinsip yang harus digarisbawahi (walaupun dalam pelaksanaan Pemilukada tidak langsung nanti ternyata menyenangkan rakyat) adalah: Pertama, Pemilukada tidak langsung menyebabkan hak pilih rakyat hilang. Kedua, Pemilukada tidak langsung menyebabkan anggota DPRD mendapat dua hak sekaligus, yakni hak pilih dan hak legislasi. Padahal jika Pemilukada secara langsung, tidak menyebabkan hak pilih anggota DPRD (sebagai warga negara) hak pilihnya tetap ada.

Selama ini pemilu dianggap sebagai satu-satunya cara yang paling demokratis dalam membentuk suatu pemerintahan yang baik. Melalui pemilu yang jujur, adil, dan bebas, secara langsung rakyat dapat melakukan sirkulasi penggantian elit pemerintahan dengan jalan damai tanpa merusak tatanan dan aturan main yang telah disepakati bersama. Selain itu, pemilu juga mempunyai fungsi untuk membentuk suatu pemerintahan yang mempunyai legitimasi dari rakyatnya, memilih dan membentuk lembaga-lembaga perwakilan bagi warga negaranya dan yang terakhir adalah untuk memberikan pendidikan politik bagi warga negara Pemilu tahun 2004 merupakan pemilu kedua yang dilaksanakan setelah masa orde baru dan diikuti oleh banyak partai politik. Perolehan suara pada pemilu tahun 2004 memperlihatkan bahwa perilaku pemilih dalam

memilih partai politik mengalami pergeseran yang berarti, dimana pada pemilu-pemilu sebelumnya, perilaku pemilih didasari pada kesamaan aliran, agama, suku, maupun ideologi. Maka pada tahun 2004 dengan munculnya sejumlah partai-partai baru seperti PKS, PDS, dan Demokrat, pemilih mempunyai pilihan yang beragam dengan ideologi yang beragam pula. Munculnya partai-partai baru tersebut yang memperoleh suara diatas 5%. Dengan demikian pemilu merupakan jalan yang paling baik dan aman dibandingkan dengan cara-cara kekerasan massa. Namun pada kenyataannya, menciptakan pemilu yang jujur, adil dan bebas sangat sulit untuk dilakukan, mengingat terdapatnya berbagai kepentingan politik untuk berebut kekuasaan memperlihatkan bahwa terjadi pergeseran perilaku pemilih yang mulai mengalihkan pilihan tradisionalnya dari PPP, Golkar, PDI, PKB, PAN, PBB kepada partai-partai lain. Pada tanggal 9 Desember 2015 sebenarnya telah diadakan pemilihan kepala daerah di kabupaten tasikmalaya hanya saja dikarenakan memiliki calon tunggal sehingga di tunda hingga 2017 ini sesuai dengan isi undang- undang tentang pilkada 2015.

Melihat fenomena diatas, maka dapat kita pahami bahwa sebenarnya, Perilaku pemilih Secara sederhana dapat didefinisikan sebagai keikutsertaan warga negara dalam pemilihan umum melalui serangkaian kegiatan membuat keputusan, yakni apakah memilih atau tidak memilih dalam pemilihan umum. Kalau memutuskan memilih, apakah memilih partai atau kandidat X ataukah partai atau kandidat Y. Berkaitan dengan hal ini pilihan seseorang tentu saja dipengaruhi oleh banyak hal, salah satunya variabel pendidikan. Affan Gafar menyebutkan bahwa karakteristik sosial yang salah satunya adalah pendidikan akan mempengaruhi perilaku pemilih. Sejumlah ilmunan yang meneliti mengenai perilaku pemilih di Amerika memiliki temuan-temuan yang beraneka ragam terhadap pengaruh antara pendidikan dengan perilaku pemilih. Affan Gafar misalnya, hasil penelitiannya di desa Brobanti menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara pendidikan dan perilaku pemilih, tetapi pengaruh tersebut sangat lemah. Sedangkan Raymond Wolfinger dan Steven Rosenstone mendapatkan kesimpulan dari penelitiannya bahwa pendidikan merupakan hal yang penting dalam mempengaruhi pilihan seseorang untuk ikut memilih atau tidak dalam pemilihan umum. Seseorang dengan pendidikan menengah hingga tinggi rata-rata memutuskan untuk ikut dalam pemilu, sebaliknya seseorang

dengan pendidikan yang rendah cenderung tinggal dirumah mereka dan tidak tertarik untuk memilih. Aspek pendidikan mampu membuat masyarakat memiliki pandangan yang luas terhadap dunia politik, perbedaan diantara masyarakat yang berpendidikan tinggi maupun rendah terlihat dari sikap dan perilaku mereka. Pendidikan akan memberikan kepercayaan diri bagi masyarakat untuk mampu mempengaruhi kebijakan-kebijakan politik pemerintah yang pada akhirnya akan membawa masyarakat kepada partisipasi politik dalam level yang tinggi.

Perilaku pemilih merupakan topik yang menarik untuk di teliti terkait dengan studinya yang masih sedikit dilakukan di Kabupaten Tasikmalaya. Rapat pleno terbuka rekapitulasi suara pemilihan bupati dan wakil bupati Tasikmalaya yang diselenggarakan di gedung da'wah islamiyah mesjid besar singaparna kabupaten tasikmalaya dihadiri oleh muspida kabupaten tasikmalaya, ketua ppk, sekretaris ppk dan seluruh anggotanya, camat, panwascam sekabupaten tasikmalaya, timkampanye, serta tokoh masyarakat kabupaten tasikmalaya yang di dalamnya menghasilkan raihan suara untuk pasangan setuju berjumlah 500.908 suara dan suara untuk tidak setuju berjumlah 242.862 suara, total suara sah berjumlah 743.773 suara dan suara tidak sah berjumlah 66.891 sehingga total suara yang masuk berjumlah 810.644 suara dengan tingkat partisipasi sebesar 60.33%. dalam pemilihan kepala daerah kabupaten tasikmalaya tahun 2015 DPT terbanyak dari kecamatan karangnuggal yang berjumlah 65.621 jiwa dan DPT terkecil dari kecamatan karang jaya yang berjumlah 10.122 jiwa. Tingkat partisipasi pemilih yang terbanyak dari kecamatan karang jaya sebesar 71.93% melebihi tingkat rata-rata partisipasi sekabupaten tasikmalaya yang hanya 60.33%. Yang terkecil dari kecamatan kadipaten sebesar 50.17% . Lokasi yang peneliti pilih pada penelitian ini adalah di Desa Pakemitan Kidul, yaitu sebuah desa yang terletak di kecamatan Ciawi yang memiliki tingkat partisipasi sebanyak 59.24% , Kabupaten Tasikmalaya. Di lokasi ini, terdapat tingkatan pendidikan yang heterogen, Untuk itu peneliti tertarik untuk melihat bagaiman perilaku pemilih di Desa Pakemitan Kidul meliputi pertimbangan-pertimbangan apa saja yang dilakukan pemilih dengan latar belakang tingkat pendidikan yang berbeda-beda ini dalam menentukan pilihannya pada Pemilihan kepala daerah Kabupaten tasikmalaya 2015.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil pengamatan dan studi pendahuluan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Penelitian ini memfokuskan pada identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan terhadap Partisipasi Politik di desa pakemitan kidul ciawi tasikmalaya.
2. Seberapa besar pengaruh perbedaan tingkat pendidikan terhadap Partisipasi Politik di desa pakemitan kidul ciawi tasikmalaya.

C. Rumusan Masalah

Melalui uraian diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Partisipasi politik Masyarakat Desa Pakemitan Kidul Pada Pemilihan Kepala daerah Kabupaten Tasikmalaya 2015.

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk Bagaimana Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Partisipasi politik Masyarakat Desa Pakemitan Kidul Pada Pemilihan Kepala daerah Kabupaten Tasikmalaya 2015.
2. Untuk mengidentifikasi Partisipasi Politik Masyarakat Desa Pakemitan Kidul Pada Pemilihan Kepala daerah Kabupaten Tasikmalaya 2015.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Bagi Penulis

Bagi penulis penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis dalam melihat fenomena politik yang terjadi di masyarakat.

2. Manfaat dari segi teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk menambah khazanah keimuan, mengembangkan konsep dan teori yang berhubungan dengan perilaku pemilih.

Menambah informasi dan pengetahuan bagi masyarakat tentang perilaku pemilih dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

F. Definisi Operasional

1. Pengertian Pengaruh

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005: 849), “Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.” Sementara itu, Surakhmad (1982:7) menyatakan bahwa pengaruh adalah kekuatan yang muncul dari suatu benda atau orang dan juga gejala dalam yang dapat memberikan perubahan terhadap apa-apa yang ada di sekelilingnya. Jadi, dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pengaruh merupakan suatu daya atau kekuatan yang timbul dari sesuatu, baik itu orang maupun

benda serta segala sesuatu yang ada di alam sehingga mempengaruhi apa-apa yang ada di sekitarnya.

2. Prilaku Pemilih

Para ahli ilmu politik menyebutkan bahwa tingkah laku individu dalam pemungutan suara pada kegiatan pemilu disebut dengan konsep perilaku pemilih (*voting behavior*). Harold F. Gosnell memberikan batasan sebagai berikut: Pemungutan suara adalah proses dimana seseorang anggota masyarakat dari suatu kelompok menyatakan pendapatnya dan dengan demikian ikut serta dalam menentukan konsensus diantara anggota-anggota kelompok itu dalam pemilihan seorang pejabat maupun keputusan yang diusulkan. Dengan demikian, konsep voting berkaitan dengan pemberian suara dari seorang individu dalam rangka ikut berpartisipasi dalam politik.

Secara sederhana *voting behavior* bisa didefinisikan sebagai keikutsertaan warga negara dalam pemilihan umum melalui serangkaian kegiatan membuat keputusan, yakni apakah memilih atau tidak memilih dalam pemilihan umum. Kalau memutuskan memilih, apakah memilih partai atau kandidat X atautkah partai atau kandidat Y. Menurut Affan Gaffar, dalam menganalisis *voting behavior* dan untuk menjelaskan pertimbangan-pertimbangan yang digunakan sebagai alasan oleh para pemilih dalam menjatuhkan pilihannya, dikenal dua macam pendekatan, yaitu Mazhab Columbia yang menggunakan pendekatan sosiologis dan mazhabMichigan yang dikenal dengan pendekatan psikologis. Selain itu terdapat pula pendekatan rational choice yang melihat perilaku seseorang melalui kalkulasi untung rugi yang didapatkan oleh orang tersebut.

3. Pengertian Pendidikan

Pendekatan-pendekatan seperti pendekatan sosiologis, psikologis maupun pilihan rasional memiliki keterkaitan dengan latar belakang pendidikan seseorang. Taufik Abdullah menyebutkan bahwa pendidikan merupakan usaha untuk membina kepribadian dan kemampuan seseorang, baik itu kemampuan jasmani dan rohani yang dilakukan dalam rumah tangga, sekolah, dan dalam masyarakat agar dengan kemampuan tersebut dapat mempertahankan, mengembangkan kelangsungan hidup masyarakat.

Pendidikan formal yaitu pendidikan yang kita kenal dengan pendidikan di sekolah yang diatur bertingkat dengan syarat-syarat yang jelas.

Menurut Notoatmodjo (2003) tingkat pendidikan dapat dibedakan berdasarkan tingkatan-tingkatan tertentu seperti:

- a. Pendidikan dasar awal selama 9 tahun meliputi SD/ sederajat, SLTP/ sederajat.
- b. Pendidikan lanjut :
 - 1) Pendidikan menengah minimal 3 tahun meliputi SMA atau sederajat dan;
 - 2) Pendidikan tinggi meliputi diploma, sarjana, magister, doktor dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

4. Partisipasi politik

secara harafiah berarti keikutsertaan, dalam konteks politik hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Keikutsertaan warga dalam proses politik tidaklah hanya berarti warga mendukung keputusan atau kebijakan yang telah digariskan oleh para pemimpinnya, karena kalau ini yang terjadi maka istilah yang tepat adalah mobilisasi politik. Partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan.

5. Masyarakat

adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup (atau semi terbuka), di mana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Kata "masyarakat" sendiri berakar dari kata dalam bahasa Arab, musyarak. Lebih abstraknya, sebuah masyarakat adalah suatu jaringan hubungan-hubungan antar entitas-entitas. Masyarakat adalah sebuah komunitas yang interdependen (saling tergantung satu sama lain). Umumnya, istilah masyarakat digunakan untuk mengacu sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur.

6. Kepala daerah

dalam konteks Indonesia, adalah gubernur (kepala daerah provinsi), bupati (kepala daerah kabupaten), atau wali kota (kepala daerah kota). Kepala daerah dibantu oleh seorang wakil kepala daerah. Sejak tahun 2005, pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada).

G. Sistematika Skripsi

1. Bagian Pembuka Skripsi
2. Bagian Isi Skripsi
 - a. Bab I Pendahuluan
 - 1) Latar Belakang Masalah
 - 2) Identifikasi Masalah
 - 3) Rumusan Masalah
 - 4) Tujuan Penelitian
 - 5) Manfaat Penelitian
 - 6) Definisi Oprasional
 - 7) Sistematika Skripsi
 3. Bab II Kajian Teori Dan Kerangka Pemikiran
 - a. Kajian Teori
 - 1) Prilaku Pemilih
 - 2) Pendekatan Sosiologis
 - 3) Pendekatan Psikologis

- 4) Pendekatan Rasional
 - 5) Pengertian Pendidikan
 - b. Penelitian Terdahulu
 - c. Kerangka Pemikiran
 - d. Asumsi dan Hipotesis
4. Bab III Metode Penelitian
- a. Metode Penelitian
 - b. Desain Penelitian
 - c. Subjek Dan Objek Penelitian
 - d. Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian
 - e. Teknik Analisis Data
 - f. Prosedur Penilaian
5. Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan
- a. Karakteristik Koresponden.
 - b. Tingkat Pendidikan (variabel X).
 - c. Variabel Perilaku Pemilih (Variabel Y).
 - d. Pola Hubungan antar Variabel X dan Y.
 - e. Analisa Data Hubungan Antara Tingkat Pendidikan dan Partisipasi Politik.
6. Bab V Simpulan Dan Saran
- a. Kesimpulan
 - b. Saran

Dalam skripsi ini penulis membanginya dalam lima bab. Bab I akan memaparkan mengenai latar belakang masalah dan permasalahannya. Disini penulis mengangkat mengenai permasalahan bagaimana pengaruh tingkat pendidikan terhadap partisipasi politik masyarakat desa pakemitan kidul pada pemilihan kepala daerah kabupaten tasikmalaya 2015, yang dimana dugaan sementara penulis adanya hubungan antara tingkat pendidikan terhadap paertisipasi politik suatu daerah.

Bab II akan memaparkan mengenai kajian teori dan dasar pemikiran yang di mana berisi deskripsi teoretis yang memfokuskan kepada hasil kajian atas teori, konsep, kebijakan, dan peraturan yang ditunjang oleh hasil penelitian terdahulu yg sesuai dengan masalah yg penulis teliti “bagaimana

pengaruh tingkat pendidikan terhadap partisipasi politik masyarakat desa pakemitan kidul pada pemilihan kepala daerah kabupaten tasikmalaya 2015". Melalui kajian teori peneliti merumuskan definisi konsep dan definisi oprasional variabel yang kemudian dilanjutkan dengan perumusan kerangka pemikiran yang menjelaskan keterkaitan dari variabel-variabel yang terikat dalam penelitian.

Kemudian dalam bab III tentang metode penelitian, penulis menjelaskan secara sistematis dan terperinci langkah-langkah dan cara yang digunakan dalam menjawab permasalahan dan memperoleh simpulan dari bagaimana pengaruh tingkat pendidikan terhadap partisipasi politik masyarakat desa pakemitan kidul pada pemilihan kepala daerah kabupaten tasikmalaya 2015.

Selanjutnya bab IV hasil penelitian dan pembahasan, penulis menyampaikan dua hal utama, yaitu temuan penelitian berdasarkan hasil pengolahan dan analiis data dengan berbagai kemungkinan bentuknya sesuai dengan urutan rumusan masalah penelitian dan pembahasan temuan penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan.

Terahir adalah bab v yaitu kesimpulan dan saran, disini penulis menyimpulkan dari hasil-hasil pengkajian seluruh bab kemudian ditarik suatu uraian yang menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap analisis bagaimana pengaruh tingkat pendidikan terhadap partisipasi politik masyarakat desa pakemitan kidul pada pemilihan kepala daerah kabupaten tasikmalaya 2015. Dan saran merupakan rekomendasi yang ditujukan kepada para pembuat kebijakan, pengguna, atau kepada peneliti berikutnya yang berminat melakukan penelitian selanjutnya, dan kepada pemecah masalah dilapangan atau *follow up* dari hasil penelitian.